



# MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

## Agenda Permasalahan Tahun 2006

**Masalah-Masalah Sosial di Indonesia: Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan antar-variabel dan Metode Analisis**  
Doddy Sumbodo Singgih

**Implementasi Kebijakan: Jaring Pengaman Sosial - Operasi Pasar Khusus Beras (JPS – OPKB) Keluarga Pra Sejahtera**  
Eko Supeno

**Protes Sosial Buruh sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik**  
Kris Nugroho

**Negara Madura: Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**  
Muryadi

**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya: Penyebab dan Kendala Penanganannya**  
Sudarso

**Prospek Perbankan Syariah pada Masa Mendatang**  
Toto Warsoko Pikir

**The Difficult but Interesting Problems of Clearly Conceptualizing Tourism and The Tourism Industry, and Differentiating The Two**  
Dian Yulie Reindrawati

**Reformasi dan Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik**  
Rochyati Wahyuni Triana

## **MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK**

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

### **Pemimpin Umum**

Hotman M. Siahaan

### **Wakil Pemimpin Umum**

I. Basis Susilo

### **Penanggungjawab**

Kris Nugroho

### **Dewan Redaksi**

Soetandyo Wignjosuebrotto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

### **Pemimpin Redaksi**

Doddy S. Singgih

### **Sekretaris Redaksi**

Harijono

### **Redaksi Pelaksana**

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

### **Produksi dan Pemasaran**

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5012442

e-mail : [fisip@unair.ac.id](mailto:fisip@unair.ac.id)

## Pengantar Redaksi

Memasuki tahun 2006 banyak sekali agenda permasalahan pemerintah yang harus segera diselesaikan sebagai akibat lanjutan dari tahun sebelumnya. Menurut catatan yang ada pada redaksi, permasalahan cukup menonjol yang dihadapi memasuki tahun 2006 meliputi berbagai aspek baik sosial, ekonomi, hukum, politik, keamanan, budaya.

Permasalahan yang dihadapi saat ini merupakan akumulasi buah kebijakan pemerintah yang sarat dengan berbagai kepentingan dan kontroversi. Sebut saja misalnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (dengan harapan subsidi BBM dapat mengalir kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan) ditengah keterpurukan ekonomi dan daya beli masyarakat, belum lagi ketidakjelasan status hukum pejabat korup yang dapat berkeliaran secara bebas, maraknya terorisme dan separatisme, banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anjal, masyarakat miskin dan terlantar, gelandangan dan pengemis, dan sebagainya.

Hendaknya pemerintah dapat arif dan bijaksana untuk mengurai satu per satu permasalahan yang ada, sebelum permasalahan yang lain dan lebih besar datang. Di mana pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan, keputusan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Secara teoritik kumpulan artikel, dan hasil penelitian yang diulas dalam jurnal ini tidak lain adalah beberapa contoh permasalahan yang dihadapi pemerintah memasuki tahun 2006, selain terdapat berbagai tulisan di luar topik utama, antara lain: Masalah-Masalah Sosial di Indonesia: Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan Antar-Variabel dan Metode Analisis disajikan Doddy Sumbodo Singgih; dari sisi kebijakan, tulisan Eko Supeno mengulas tentang Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial-Operasi Pasar Khusus Beras (JPS-OPKB) Keluarga Pra Sejahtera; Protes Sosial Buruh sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik oleh Kris Nugroho dari segi politis, kemudian wacana tentang Negara Madura: Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Muryadi, sudut pandang sosial Sudarso mengupas tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya: Penyebab dan Kendala Penanganannya, secara ekonomi Prospek Perbankan Syariah pada Masa Mendatang oleh Toto Warsoko Pikir, dinamika pariwisata disampaikan oleh Dian Yulie Reindrawati tentang The Difficult but Interesting Problems of Clearly Conceptualizing Tourism and The Tourism Industry, and Differentiating The Two, kemudian permasalahan kelembagaan dijelaskan oleh Rochyati

Topik Utama Edisi No. 2 (April) 2006:  
**Pornografi dan pelayanan Publik**

Wahyuni Triana mengenai Reformasi dan Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Kepemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kehadiran Jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* pada tahun 2006 ini semoga dapat memberikan pencerahan sekaligus alternatif pemecahan masalah dan menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam menuangkan gagasan serta ide kreatif demi perbaikan proses pembangunan serta perbaikan masyarakat.

Redaksi

Wakil Pemimpin Redaksi  
Permasalahan yang dihadapi saat ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah korupsi yang telah merajalela di berbagai sektor kehidupan. Korupsi ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kondisi ini telah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Upaya ini harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptakan suasana yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah: pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah; kedua, memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum; ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia; kelima, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptakan suasana yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah korupsi yang telah merajalela di berbagai sektor kehidupan. Korupsi ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kondisi ini telah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Upaya ini harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptakan suasana yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

1891/TTS/PPK/RS/148-04 TTS

ISSN 2502-6120

Jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (JMKP) adalah jurnal ilmiah yang membahas masalah-masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Jurnal ini diterbitkan secara triwulanan oleh Redaksi. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan alternatif pemecahan masalah kepada pembaca. Jurnal ini juga bertujuan untuk menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam menuangkan gagasan serta ide kreatif demi perbaikan proses pembangunan serta perbaikan masyarakat.

## DAFTAR ISI

### Pengantar Redaksi

iii

### Daftar Isi

v

#### **Masalah-masalah Sosial di Indonesia: Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan antar-variabel dan Metode Analisis**

Doddy Sumbodo Singgih

1

#### **Implementasi Kebijakan: Jaring Pengaman Sosial - Operasi Pasar Khusus Beras (JPS – OPKB) Keluarga Pra Sejahtera**

Eko Supeno

9

#### **Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik**

Kris Nugroho

23

#### **Negara Madura: Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Muryadi

35

#### **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya: Penyebab dan Kendala Penanganannya**

Sudarso

45

#### **Prospek Perbankan Syariah pada Masa Mendatang**

Toto Warsoko Pikir

59

#### **The Difficult But Interesting Problems of Clearly Conceptualizing Tourism and The Tourism Industry, and Differentiating The Two**

Dian Yulie Reindrawati

69

#### **Reformasi dan Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Kepemerintahan dan Pelayanan Publik**

Rochyati Wahyuni Triana

75

## PROSPEK PERBANKAN SYARIAH PADA MASA MENDATANG

Toto Warsoko Pikir

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya

### Abstract

*This Article will discuss banking of Moslem law problems seen from various aspect, in fact, banking of Moslem law prospect believed can fulfill entire criterion which have been specified by Indonesia Bank. So long it is supported by ability of manpower and adequate infrastructure information.*

**Keywords:** *banking of Moslem law, ability of SDM, infrastructure information*

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem perbankan nasional seperti yang telah dicetuskan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah. Selain itu juga adanya berbagai kebijakan pengembangan yang diambil oleh Bank Indonesia terutama program edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap perluasan jaringan pelayanan perbankan syariah, sehingga sampai dengan kurun waktu akhir tahun 2004, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dengan adanya peningkatan total aset, penghimpunan dana pihak ketiga

(DPK), dan pembiayaan yang disalurkan (PYD), baik nilai maupun proporsinya terhadap perbankan nasional. Antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya, pasar keuangan syariah, reksadana dan asuransi syariah secara sinergi bersama-sama telah mengembangkan sistem keuangan syariah. Apalagi didukung dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai penerbitan obligasi syariah *ijarah* sangat mendorong penerbitan obligasi syariah dan meningkatkan pasar obligasi syariah tersebut. Dengan adanya peningkatan obligasi syariah tersebut berdampak pula pada peningkatan kinerja pasar reksadana syariah, khususnya untuk jenis reksadana pendapatan tetap. Namun demikian, perkembangan keuangan syariah tersebut ternyata tidak dibarengi dengan pengembangan sumber daya insani (SDI) yang memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan belum lengkapnya infrastruktur dan regulasi, khususnya untuk lembaga keuangan syariah non

bank. Hal ini merupakan suatu tantangan yang harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan maupun upaya-upaya yang intensif untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut.

#### **Perkembangan Perbankan Tahun 2004**

Dalam tahun 2004, berbagai langkah kebijakan masih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan stabilitas dan kegiatan penyaluran kredit perbankan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk perbaikan dari realisasi tahun sebelumnya. Dari segi mikro, upaya untuk meningkatkan stabilitas perbankan telah dilakukan melalui program konsolidasi dan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian. Atas upaya tersebut telah dapat meningkatkan stabilitas perbankan tercermin dengan semakin kuatnya struktur modal, menurunnya risiko kredit, dan meningkatnya profitabilitas perbankan. Selain itu juga telah dapat meningkatkan penyaluran kredit hingga melampaui prakiraan awal tahun. Peningkatan kredit tersebut terjadi karena adanya kegiatan ekonomi yang meningkat dan terjaganya stabilitas makro dan ditopang oleh kondisi mikro yang semakin membaik, disamping adanya kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka mendorong pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sejalan dengan kemajuan yang dicapai, tantangan untuk meningkatkan peran sistem keuangan, khususnya peran perbankan dalam perekonomian juga semakin besar, terutama dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat kedepan, memperkuat struktur perbankan menjadi sangat penting. Bank Indonesia telah menyusun langkah-langkah untuk mendorong proses

konsolidasi perbankan pada tahun 2005, terutama untuk mengantisipasi inovasi produk keuangan dan semakin kuatnya hubungan antara perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, yang memunculkan tantangan baru dalam mengelola risiko yang melekat (*inherent risks*) pada perbankan dan efek rambatan (*contagious effects*) dalam sistem keuangan. Bank Indonesia telah memprakarsai upaya penyusunan Arsitektur Keuangan Indonesia (ASKI) sebagai landasan dalam membangun sistem keuangan yang kokoh dan mampu menunjang kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

Kebijakan yang telah diambil Bank Indonesia terdiri dari:

1. Pemantapan ketahanan sistem keuangan perbankan dan program pemulihan perbankan yang meliputi pelaksanaan program penjaminan Pemerintah (*blanket guarantee*), program divestasi sebagai kelanjutan dari program rekapitulasi perbankan, restrukturisasi kredit, serta pengembangan infrastruktur perbankan;
2. Pemantapan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan yang meliputi peningkatan *good corporate governance*, penyempurnaan pengaturan dan sistem pengawasan bank;
3. Pengembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejalan dengan upaya mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Sebagai langkah awal, pada tahun 2004 telah ditandai dengan dimulainya implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan landasan dan

arah kebijakan perbankan dalam jangka panjang.

Jumlah bank sampai dengan akhir tahun 2004 menurun dengan adanya penutupan dua bank pada bulan April 2004, *self liquidation* satu bank, merger tiga bank, dan terdapat satu bank yang dibekukan usahanya pada Desember 2004 (Tabel 1). Penutupan dan pembekuan bank adalah merupakan suatu fenomena yang alami bagi industri perbankan dan dapat terjadi pada semua bank baik Bank Persero, Swasta maupun Bank Asing. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya kesalahan kelola bank baik yang dilakukan oleh manajemen maupun pemilik bank yang menginginkan suatu keuntungan diluar konteks operasional perbankan yang sehat dan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* yang saat ini sedang gencar-gencarnya dideklarasikan oleh Bank Indonesia melalui PBI. Di dalam perjalanannya proses penutupan maupun pembekuan bank dilakukan secara hati-hati dan transparan, dan perlu dilakukan terutama untuk menjaga stabilitas dan dalam rangka membangun industri perbankan yang kokoh, sehat terutama memperkuat struktur permoadalannya. Mengingat dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan masyarakat banyak meskipun bank tersebut telah mengikuti penjaminan, namun proses pembayaran kembali kepada nasabah tidaklah mudah masih perlu pembuktian dari pihak pemerintah melalui BPK. Selain itu dalam era

globalisasi ini tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terutama untuk memperoleh informasi atas transaksi dengan mitra bisnisnya. Untuk itu bank harus berlomba-lomba untuk memenuhinya agar tidak kehilangan kesempatan untuk menunjang kegiatan operasionalnya masa sekarang dan mendatang. Perlu diketahui meskipun hal tersebut merupakan tantangan bank namun harus disikapi dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjerumus menjadi boomerang yang menyebabkan adanya penutupan dan pembekuan bank.

Tabel 1  
Perkembangan Jumlah dan Kantor Bank

| Kelompok Bank   | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Bank Umum       |       |       |       |       |
| Jumlah Bank     | 145   | 141   | 138   | 133   |
| Jumlah Kantor   | 6.765 | 7.001 | 7.730 | 7.939 |
| Bank Persero    |       |       |       |       |
| Jumlah Bank     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Jumlah Kantor   | 1.807 | 1.885 | 2.072 | 2.112 |
| BPD             |       |       |       |       |
| Jumlah Bank     | 26    | 26    | 26    | 26    |
| Jumlah Kantor   | 857   | 909   | 1.003 | 1.064 |
| BUSN Devisa     |       |       |       |       |
| Jumlah Bank     | 38    | 36    | 36    | 34    |
| Jumlah Kantor   | 3.342 | 3.565 | 3.829 | 3.947 |
| BUSN Non Devisa |       |       |       |       |
| Jumlah Bank     | 42    | 40    | 40    | 38    |
| Jumlah Kantor   | 556   | 528   | 700   | 688   |
| Bank Campuran   |       |       |       |       |
| Jumlah Bank     | 24    | 24    | 20    | 19    |
| Jumlah Kantor   | 53    | 53    | 57    | 59    |
| Bank Asing      |       |       |       |       |
| Jumlah Bank     | 10    | 10    | 11    | 11    |
| Jumlah Kantor   | 60    | 61    | 69    | 59    |

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2004

Kondisi perbankan pada tahun 2004 (Tabel 2) menunjukkan perkembangan yang membaik, hal ini tercermin dengan adanya pertumbuhan kredit sebesar 24,7% melampaui batas atas perkiraan awal tahun sebesar 20% dan meningkatnya profitabilitas. Pencapaian pertumbuhan kredit tersebut juga disertai dengan semakin membaiknya kualitas kredit dengan menurunnya NPL. Demikian juga aspek permodalan berada di atas batas

minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Fungsi intermediasi semakin membaik seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian, secara nominal jumlah kredit selama tahun 2004 bertambah Rp 117,9 triliun sementara jumlah DPK hanya tumbuh sebesar Rp 74,5 triliun. Dengan adanya kondisi tersebut membuat *incremental* LDR meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir telah melebihi pertumbuhan DPK. Perolehan laba juga semakin membaik dengan adanya perkembangan laba sebesar Rp 14,7 triliun pada tahun 2004 sebagai pengaruh dengan semakin membaiknya kualitas kredit. Komposisi aktiva produktif perbankan bergeser yang semula ditanamkan pada obligasi dan SBI menjadi kredit. Hal ini didorong dengan semakin rendahnya suku bunga SBI dan obligasi sebagai cermin dengan semakin membaiknya prospek ekonomi. Dari sisi DPK tumbuh sebesar Rp 74,5 triliun, diwarnai dengan pergeseran simpanan dari deposito ke tabungan dan giro dipengaruhi oleh daya tarik

Pasar modal yang masih tinggi sehingga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan dana jangka pendek untuk bertransaksi. Untuk menggalang dana, salah satu strategi bank yang dipakai adalah dengan memberikan penawaran hadiah maupun kemudahan lainnya sehingga berpengaruh terhadap *preferensi* masyarakat dalam memilih jenis simpanan di bank. Dengan adanya pergeseran DPK dari deposito ke simpanan jangka pendek akan

meningkatkan risiko likuiditas perbankan. Guna mengurangi risiko *mismatch* perbankan akan mencari segmen kredit konsumsi atau modal kerja yang berjangka pendek.

Dari sisi penyaluran kredit, kredit investasi dan kredit modal kerja mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan naiknya peranan investasi dan produksi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan penyaluran kredit perbankan mendorong peningkatan pangsa kredit dalam PDB (Produk Domestik Bruto). Seiring dengan pertumbuhan kredit diimbangi dengan semakin membaiknya kualitas kredit yang semula rasio NPL (*Non Performing Loan*) *gross* 8,2% menjadi 5,8% dan untuk NPL *neto* dari 3,0% menjadi 1,7% dari tahun sebelumnya. Hasil akhir dari adanya kondisi meningkatnya kredit dan disertai dengan membaiknya NPL, adalah tetap terjaganya *profitabilitas* seperti tergambar dari adanya peningkatan *return to assets* (ROA) maupun *net interest*

Tabel 2  
Indikator Kinerja Bank Umum

| Indikator                 | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total Aset                | 1.039,9 | 1.099,7 | 1.112,2 | 1.213,5 | 1.272,1 |
| Dana Pihak Ketiga (DPK)   | 699,1   | 797,4   | 835,8   | 888,6   | 963,1   |
| Kredit                    | 320,4   | 358,6   | 410,3   | 477,2   | 595,1   |
| LDR (%)                   | 33,4    | 33,0    | 38,2    | 43,5    | 50,0    |
| NPL – gross (%)           | 18,8    | 12,1    | 8,1     | 8,2     | 5,0     |
| NPL – net (%)             | 5,8     | 3,6     | 2,1     | 3,0     | 1,7     |
| Modal                     | 53,5    | 62,3    | 93,0    | 110,8   | 118,6   |
| CAR (%)                   | 12,5    | 19,9    | 22,4    | 19,4    | 19,4    |
| Laba (Rugi) sebelum pajak | 10,5    | 13,1    | 22,0    | 26,4    | 41,1    |
| ROA (%)                   | 1,6     | 1,5     | 2,0     | 2,5     | 3,5     |
| Net Interest Margin       | 22,8    | 37,8    | 42,9    | 49,5    | 65,8    |

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2004

*margin* (NIM) Dari peningkatan kredit secara keseluruhan pangsa kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga meningkat dengan pesat. Hal ini tidak

lepas dari peranan Bank Indonesia untuk terus menerus mendorong bank umum untuk mendukung pembiayaan UMKM dalam rencana bisnya. Target dalam rencana bisnis tahun 2004 kredit UMKM sebesar Rp 36,0 triliun, namun kenyataannya realisasi sebesar Rp 69,4 triliun jauh diatas 192,7% dari rencana bisnis perbankan. Perlu dicatat bahwa peningkatan kredit UMKM juga disertai dengan membaiknya NPL dari 4,3% menjadi 3,4% masih dibawah NPL secara keseluruhan kredit. Gambaran ini juga merupakan salah satu faktor bagi perbankan untuk tetap dapat mempertahankan *profitabilitasnya*.

Dari perkembangan empat tahun terakhir, sektor perdagangan banyak menerima penyaluran kredit UMKM disamping sektor perindustrian.

#### Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004

Fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dipengaruhi oleh beberapa norma dasar, yaitu:

1. *Halalan thayibah*, sebagai instrumen untuk mengarahkan kegiatan usaha agar senantiasa bermanfaat dan dilakukan dengan cara yang baik;
2. Zakat dan larangan riba, sebagai instrumen pendorong untuk memicu dan mengoptimalkan investasi masyarakat; dan
3. Larangan judi, sebagai instrumen untuk memastikan keterkaitan investasi dengan sektor riil.

Dengan berjalannya norma-norma dasar tersebut dalam sistem perbankan syariah akan menjadikan perbankan syariah sebagai lembaga yang mampu memberikan peranan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Selama tahun 2004 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah bertambah satu Bank Usaha Syariah, tujuh Unit Usaha Syariah dan empat BPRS (Tabel 3).

Tabel 3  
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

| Kelompok Bank         | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Bank Umum Syariah     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    |
| Unit Usaha Syariah    | 1    | 3    | 3    | 6    | 8    | 15   |
| Jumlah Kantor BUS&UUS | 40   | 62   | 96   | 127  | 253  | 355  |
| Jumlah BPRS           | 78   | 78   | 81   | 83   | 84   | 88   |
| Total                 | 118  | 140  | 177  | 210  | 337  | 443  |

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia 2004

Peningkatan BUS berasal dari konversi bank umum konvensional menjadi BUS, yaitu Bank Tugu menjadi Bank Syariah Mega Indonesia atau biasa disingkat Bank Syariah Indonesia (BSI) saja. Sedangkan untuk UUS berasal dari pembukaan dua Bank Umum Swasta Nasional yaitu Bank Niaga dan Bank Permata dan lima UUS dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu BPD DKI, BPD Riau, BPS Kalsel, BPD Sumut dan BPD Aceh. Untuk BPRS berasal dari pemberian ijin operasional lima BPRS yaitu BPRS Situbondo, BPRS tenggamus, BPRS Buana Mitra Perwira, BPRS Artha Surya Barokah dan BPRS Bhakti Sumekar dan pencabutan ijin usaha BPRS Dharma Amanah. Dengan adanya peningkatan jaringan kantor BUS dan UUS tersebut menggambarkan bahwa prospek dan kinerja perbankan syariah

sangat bagus. Hal ini tercermin dengan adanya peningkatan aset tahun 2004 terhadap tahun 2003 (Tabel 4) yang pesat, yaitu dari Rp 7,8 triliun menjadi Rp 14,0 triliun atau meningkat 79,48% yang merupakan peningkatan tertinggi selama ini. Kegiatan pembiayaan (PYD) perbankan syariah pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 5,40 triliun dari tahun 2003 sebesar Rp 5,5 triliun menjadi Rp 10,9 triliun. Untuk penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah selama tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp 4,8 triliun terhadap tahun 2003

peningkatan kebutuhan modal yang pada gilirannya kondisi permodalan perbankan syariah mengalami penurunan seperti tercermin dari penurunan CAR dari 20,7% menjadi 11,9% pada tahun 2004. Dengan adanya kondisi aset, DPK dan PYD seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pangsa total aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional dari 0,7% pada akhir tahun 2003 menjadi 1,2% pada akhir tahun 2004, DPK meningkat dari 0,6% menjadi 1,2% dan pangsa PYD meningkat juga dari 1,2 % menjadi 1,9%.

Tabel 4  
Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam miliar Rp)

| Indikator                       | Trw IV/03 | Trw 1/04 | Trw 2/04 | Trw3/04 | Trw4/04 |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| Aset                            | 7,858     | 9,498    | 11,023   | 12,719  | 14,035  |
| Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) | 5,530     | 6,415    | 8,356    | 10,131  | 10,978  |
| Dana Pihak Ketiga               | 5,724     | 7,022    | 8,513    | 9,675   | 10,559  |
| Laba /Rugi                      | 42,7      | 38,3     | 85,3     | 132,0   | 173,5   |
| FDR                             | 96,6%     | 91,4%    | 100,5%   | 104,7%  | 104,0%  |
| NPF                             | 2,3%      | 2,6%     | 2,4%     | 2,8%    | 2,8%    |

Sumber : Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004

dari Rp 5,7 triliun menjadi Rp 10,5 triliun. Dengan adanya laju PYD yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan DPK membuat FDR perbankan syariah meningkat dari sebelumnya 96,6% menjadi 104,0%. Rasio *Non Performing Finance* (NPF) perbankan syariah masih dibawah 5% yaitu dari semula 2,3 % menjadi 2,8%.

Dari segi profitabilitas, pada tahun 2004 secara total bank syariah mencatat keuntungan sebesar Rp 173,5 milyar dengan ROA yang cukup bagus yaitu 1,6%. Dibandingkan tahun 2003 dengan laba Rp 42,7 milyar dan ROA 0,9%, maka peningkatan keuntungan tersebut relative tinggi, mengingat kondisi perkembangan industri masih dalam tahapan ekspansi. Namun demikian tidak dapat menutupi

### Prospek Perbankan Syariah Di Masa Mendatang

Prospek perbankan syariah pada tahun mendatang diperkirakan cukup baik, mengingat perkembangan sampai

dengan tahun 2004 seperti yang telah dikemukakan diatas. Baik dari sisi volume usaha yang ditopang dengan adanya perluasan jaringan kantor maupun dilandasi dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mengarahkan perbankan syariah harus tetap berkembang minimal memenuhi API dengan modal minimum Rp 100 milyar. Beberapa Ketentuan Yang Perlu Dilaksanakan Oleh Perbankan berdasarkan Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah Indonesia yang dicanangkan sejak tahun 2002, di implementasikan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Tahap I (2003 - 2004), diarahkan untuk meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi

pertumbuhan perbankan syariah. Implementasi inisiatif strategi pada tahap ini difokuskan pada pembentukan kerangka dasar sistem pengeturan yang sesuai yang sehat.

2. Tahap II (2004 - 2008), diarahkan untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah. Implementasi inisiatif strategi pada tahap II pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program-program pengembangan yang dilakukan pada tahap I dengan fokus pada upaya realisasi kegiatan yang telah direncanakan.
3. Tahap III (2008 - 2011), diarahkan untuk memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

Dengan demikian, tahun 2004 dapat dikatakan sebagai tahun transisi untuk mengakhiri tahap I dan sekaligus sebagai tahun pertama implementasi tahap II. Yang perlu diperhatikan dalam kegiatan operasional perbankan syariah yaitu bahwa Bank Indonesia tetap berpedoman pada empat paradigma kebijakan yaitu:

- *Market driven policy*, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar;
- *Fair treatment policy*, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argumen *infant industry*;
- *Gradual and sustainable approach*, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
- *Comply to sharia principle*,

pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah;

Keempat paradigma tersebut tercermin pada ruang lingkup program-program inisiatif yang terdiri atas kepatuhan kepada prinsip syariah, ketentuan kehati-hatian, efisiensi operasi dan daya saing tinggi serta kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian. Keselarasan dengan API, perlu dilakukan konsolidasi perbankan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Periode 2004-2005

Pada periode ini konsolidasi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan pasar (*market driven approach*). Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa industri perbankan belum melakukan upaya-upaya kearah konsolidasi sesuai yang diharapkan. Inisiatif merger dan akuisisi bagi bank yang tidak mungkin mencapai modal inti minimum secara organik atau dengan menambah modal masih memerlukan arahan dari Bank Indonesia;

2. Periode 2005-2007

A. Bagi Bank dengan modal inti dibawah Rp 100 milyar

1. Pada periode ini bank diharapkan sudah memiliki modal inti minimum sebesar Rp 80 milyar.
2. Bank yang memiliki modal inti jauh dibawah Rp 80 milyar dapat melakukan merger dengan bank lain atau bank jangkar dan atau menambah modal inti.
3. Bank yang memiliki modal inti mendakati Rp 80 milyar dapat melakukan penambahan

- modal dengan target mencaapai modal inti minimum Rp 80 milyar pada akhir tahun 2007.
- B. Bagi bank dengan modal inti diatas Rp 100 milyar.
1. Bank pada kriteria Bank Kinerja Baik (BKB) selambat-lambatnya pada akhir tahun 2007.
  2. Bank yang telah memenuhi kriteria Bank Kinerja Baik dapat dikelompokkan bank yang berpotensi menjadi Bank Jangkar.
  3. Bank yang berpontensi menjadi Bank Jangkar dapat menjadi Bank Jangkar.
  4. Bank yang belum memenuhi kriteria Bank Kinerja Baik diberi kesempatan paling lambat tahun 2007 untuk memenuhi kriteria.
  5. Bank yang pada akhir tahun 2005 telah menjadi Bank Kinerja Baik diwajibkan untuk mempertahankan kriteria tersebut.
  6. Bank Indonesia akan melakukan pengujian kriteria BKB, Non-BKB dan Bank Jangkar setiap akhir tahun.
3. Periode 2008-2010
- A. Bagi Bank yang sebelumnya memiliki modal inti dibawah Rp 100 milyar.
1. Bank tidak mencapai modal inti Rp 80 milyar.  
Bank dimaksud diberi sanksi pembatasan kegiatan usaha yaitu:
    - a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa.
  2. Bank telah mencapai modal inti Rp 80 milyar pada akhir tahun 2007 diwajibkan meneruskan modal inti menjadi Rp 100 milyar dan menjadi BKB pada akhir tahun 2010.
- B. Bagi Bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimum diatas Rp 100 milyar.
1. Bank yang telah menjadi BKB sebelum akhir tahun 2007 wajib mempertahankan kriteria BKB dan melakukan penguatan permodalan sesuai dengan strata bank.
  2. Bank yang telah menjadi Bank Jangkar sebelum atau akhir tahun 2007 wajib mempertahankan status dan rencana bisnis yang disepakati dengan Bank Indonesia pada akhir tahun 2010.
  3. Bank Non BKB, Bank Indonesia akan terus menerus melakukan pengujian sampai memenuhi kriteria BKB dan bila tidak dapat memenuhi akan diberikan sanksi *disincentive* berupa pengetatan pemberian ijin.
4. Periode 2010 dan seterusnya.

1. Bank yang pada akhir tahun 2007 mempunyai modal inti Rp 80 milyar dan tidak berhasil mencapai Rp 100 milyar pada akhir tahun 2010, maka dilakukan pembatasan seperti dikemukakan nomor 3.A. diatas.
2. Bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimum diatas Rp 100 milyar pada akhir tahun 2007:
  - a. Maka setelah tahun 2010 telah memenuhi BKB.
  - b. Apabila masih terdapat belum memenuhi BKB, maka wajib merger atau akuisisi.
  - c. Bank selanjutnya terbentuk sesuai API.
  - d. Memiliki tata kelola dengan rating baik.
2. BKB berpotensi menjadi Bank Jangkar :
  - a. CAR 12% dan rasio modal inti (Tier 1) minimum 6%.
  - b. Rasio ROA 1,5%.
  - c. Pertumbuhan kredit 22% per tahun atau LDR 50% dan rasio Non Performing Loan dibawah 5%.
  - d. Bank menjadi perusahaan terbuka.
  - e. Bank memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk menjadi konsolidator dengan
  - f. tetap memenuhi kriteria sebagai BKB.

Persyaratan dan kriteria Bank Kinerja Baik dan Bank Jangkar adalah bilamana memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Selama tiga tahun terakhir :
  - a. Memiliki modal inti lebih besar Rp 100 milyar.
  - b. Memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat dengan factor manajemen tergolong baik.
  - c. Memiliki rasio CAR sebesar 10%.

### Kesimpulan

Dari gambaran dan persyaratan perkembangan perbankan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka prospek perbankan syariah diyakini dapat memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Asalkan harus didukung dengan kemampuan SDM dan sarana prasarana informasi yang memadai.

### Daftar Pustaka

Bank Indonesia. Laporan Tahunan 2004.

Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004.